



KOLABORASI *TRIPLE HELIX* DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BUTON

TRIPLE HELIX COLLABORATION IN LANDSLIDE DISASTER MANAGEMENT IN BUTON REGENCY

Asmiddin¹, Anwar Sadat², Muh Askal Basir^{2*}

¹ Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: Maret 2022
Disetujui: April 2022
Dipublikasikan: Mei 2022

Abstract

Landslide disaster management policies and actions are then transformed into communities that experience vulnerability, so that the relationship between universities, companies, and the government in the field of disaster is very much needed in disaster mitigation efforts, especially landslides. The purpose of this study was to determine the triple helix collaboration in landslide disaster management in Buton Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that the minimal level of coordination and innovation that exists in the triple helix element so that no integration is created which makes mitigation efforts seem slow; between the elements of this triple helix has a different ideology, and this ideology is sometimes highlighted by each element of the helix, so that the triple helix relation cannot be built as desired; and conditions of bureaucratic procedures that are too difficult to make elements of universities and companies reluctant to collaborate with government elements in efforts to mitigate landslides in Buton Regency.

Kata Kunci

Kolaborasi; *Triple Helix*;
Tanah Longsor

Abstrak

Kebijakan penanggulangan dan tindakan bencana tanah longsor ini, kemudian ditransformasikan kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sehingga relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dalam bidang kebencanaan sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana utamanya bencana tanah longsor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi *triple helix* dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada elemen *triple helix* sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat



upaya mitigasi terkesan lamban; antar elemen *triple helix* ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen *helix*, sehingga relasi *triple helix* tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan; dan kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton.

DOI:

10.33172/jmb.v8i1.960

e-ISSN: 2716-4462

© 2022 Published by Program Studi Manajemen Bencana
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

***Corresponding Author:**

Muh Askal Basir

Email: askal16basir@gmail.com



PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam karena terletak di zona tektonik dengan rangkaian gunung berapi aktif, sehingga sangat sensitif terhadap gempa bumi, aktivitas patahan, letusan gunung berapi, dan tsunami. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng tektonik mengalami perubahan struktur bumi secara tiba-tiba akibat adanya gaya tarik dan tekanan pada titik sesar, dan lempeng tektonik mengalami perubahan struktur bumi secara tiba-tiba. Selain itu, letak geografis Indonesia yang merupakan negara pesisir yang dikelilingi oleh kepulauan yang sangat besar, membuat wilayah ini rentan terhadap bencana jika kelestarian lingkungan tidak dikelola dengan baik (Siregar & Wibowo, 2019; Rahmat & Alawiyah, 2020; Widha et al., 2021; Priambodo et al., 2020).

Indonesia menghadapi kendala yang cukup berarti dalam beradaptasi dengan kondisi geografis wilayahnya. Kondisi geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap terjadinya berbagai jenis bencana. Di mata dunia, Indonesia adalah negara yang paling rawan bencana. Menurut United Nations Plan for International Disaster Reduction (UNISDR) yang merupakan salah satu badan PBB yang terlibat dalam strategi internasional pengurangan risiko bencana, Indonesia menempati urutan pertama dalam hal jumlah kematian akibat bencana alam. Berdasarkan data Detiknews (dalam Fatiatun et al., 2019), klasifikasi keterpaparan bencana Indonesia di dunia menurut jenis bencananya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Untuk bencana tsunami, Indonesia adalah rangking pertama dari 265 negara dengan jumlah 5.402.239 orang yang akan terkena dampaknya.

- b. Untuk bencana tanah longsor, Indonesia rangking pertama dari 162 negara dengan 197.372 orang terkena dampaknya.
- c. Untuk bencana gempa bumi, Indonesia adalah rangking ketiga dari 153 negara dengan 11.056.806 orang terkena dampaknya.
- d. Untuk bencana banjir, Indonesia rangking keenam dari 162 negara dengan 1.101.507 orang terkena dampaknya.

Berdasarkan data di atas, Indonesia memiliki jumlah korban meninggal dunia yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana harus dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh provinsi. Sebagai lokasi yang rawan bencana, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi bencana, baik yang terjadi sebelum maupun setelah bencana, seperti mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi..

Kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dimasukkan ke dalam program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Adanya ketentuan untuk melaksanakan mitigasi bencana, sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pengendalian bencana secara nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indonesia menempati urutan pertama dari 162 negara dalam hal bencana tanah longsor, maka sangat penting untuk memberikan edukasi tentang mitigasi bencana tanah longsor, agar dampak dari tanah longsor berkurang atau bahkan hilang, dan jika terjadi bencana tanah longsor, masyarakat akan lebih memahami dan reseptif untuk melakukan evakuasi atau upaya penyelamatan bencana (CNN Indonesia, 2021).

Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah rawan bencana. Berdasarkan sejarah geologi, wilayah Kabupaten Buton merupakan daerah yang tidak memiliki wilayah pedataran tinggi berupa perbukitan dan pegunungan berbentuk kerucut. Morfologi tersebut membentuk topografi yang seragam dengan kemiringan lereng yang relatif terjal hanya di sebahagian wilayah tengah Kabupaten, sedangkan dataran rendah menyebar disepanjang pantai. Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh karena beberapa faktor seperti batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri dari breksi, konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasir hingga pasir lempungan, berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4

m, dan di bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah, adanya pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru, dan adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar yang berupa bidang lurus.

Daerah Rawan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Buton meliputi Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, dan Kecamatan Siotapina. Di Kabupaten Buton, selama tiga tahun terakhir telah terjadi 4 peristiwa bencana tanah longsor dimana 1 orang meninggal, 2 orang luka-luka, 10 orang terdampak dan mengungsi, 2 rumah rusak berat, dan 76 rumah rusak sedang. Terdapat empat titik rawan longsor di Kabupaten Buton yaitu Pendakian Waode Kecamatan Wolowa, Jalan Poros Pasarwajo-Baubau tepatnya di Desa Kaongke-Ongkea Kecamatan Pasarwajo, Desa Winning Kecamatan Pasarwajo, dan Kelurahan Wakoko Kecamatan Pasarwajo.

Dari fenomena tersebut sangat dibutuhkan upaya dalam mengurangi resiko bencana tanah longsor. Relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah (*triple helix*) dalam bidang kebencanaan sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana utamanya bencana tanah longsor. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan paradigma tindakan penanggulangan bencana dari yang sifatnya responsif dan reaktif saat terjadinya bencana menjadi preventif (pencegahan, atau kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana). Unsur pemerintahlah yang memulai penciptaan atau penguatan tautan *triple helix*. Karena pemerintah memiliki lebih banyak kekuasaan dan otoritas pengaturan, inilah masalahnya. Kewenangan pemerintah pada saat terjadi bencana diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Sebagai amanat undang-undang tersebut, tugas pemerintah menjadi katalisator dalam interaksi *triple helix* ini, merangkul peran dan fungsi unsur-unsur universitas dan bisnis dalam upaya penanggulangan bencana.

Namun di Kabupaten Buton, upaya penanggulangan longsor lambat dan kurang kreatif karena pemerintah bekerja sendiri dan tidak mengoptimalkan tanggung jawab dan fungsi perguruan tinggi yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, prosedur birokrasi yang ketat menjadi lebih sistematis, menyebabkan birokrasi dipandang sebagai masalah. Akibatnya, proses komunikasi organisasi terhambat, dan *triple helix* tidak terbentuk.

Hal ini sejalan dengan Umaroh & Ritohardoyo (2016) yang menunjukkan bahwa tipe dampak yang dialami oleh masyarakat adalah dampak langsung dan dampak tidak langsung. Strategi penghidupan masyarakat pasca bencana lebih pada aset yang dimiliki untuk aktivitas pemulihan perekonomian. Pemerintah berperan aktif dalam penanggulangan bencana tanah longsor dan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanganan yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi *triple helix* dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan fokus kualitatif. Elemen terpenting dalam metode kualitatif adalah menentukan informan kunci yang sarat informasi berdasarkan pendekatan studi (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik fenomena yang tidak dipahami dengan baik. Peneliti memperoleh data dan informasi melalui dua cara untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: (1) pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam; dan (2) pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Rukin (2019) yang dimulai dari: (a) organisasi data; (b) pengolahan data; (c) interpretasi data; dan (d) kesimpulan.

Besarnya risiko yang ditimbulkan ditentukan oleh seberapa tepat tindakan yang tepat dilakukan dalam menanggapi bahaya yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam menanggapi risiko yang terjadi, dimana elemen *triple helix* melakukan studi, menyusun, dan mengimplementasikan tahap tindakan sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan, baik pada masa tanggap darurat maupun pascabencana, disepakati bersama. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya risiko yang ditimbulkan ditentukan oleh seberapa tepat tindakan yang tepat dilakukan dalam menanggapi bahaya yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam menanggapi risiko yang terjadi, dimana elemen *triple helix* melakukan studi, menyusun, dan mengimplementasikan tahap tindakan

sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan, baik pada masa tanggap darurat maupun pascabencana, disepakati bersama. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton

Masalah longsor di Kabupaten Buton sudah menjadi persoalan klasik. Seluruh upaya pengendalian bencana longsor, baik struktural, nonstruktural, dan terpadu telah dilaksanakan. Mengingat bahwa masalah tanah longsor merupakan penghalang jalan menuju kemakmuran dan kemajuan sosial, dan bahwa ada kekhawatiran yang meluas di masyarakat. Alhasil, bencana longsor sudah menjadi tugas bersama, dan dalam kasus bencana longsor Kabupaten Buton, semua elemen harus bersatu untuk mengurangi risiko longsor.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, secara fungsi elemen perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah belum berjalan dengan baik, dimana pemerintah tidak memaksimalkan peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan perusahaan. Dalam hal ini, fungsi perguruan tinggi sebagaimana kita ketahui merupakan medium dalam melahirkan para manusia yang berwawasan, berkeilmuan, dan berketerampilan profesional di bidangnya, maka keberadaan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menciptakan ide atau gagasan dalam mitigasi bencana tanah longsor.

Kurangnya maksimalnya pemerintah dalam memanfaatkan peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan perusahaan dapat dilihat dari minimnya tingkat koordinasi yang terjalin sehingga tidak tercipta satu integrasi antar tiga elemen tersebut. Kalaupun ada relasi itu sebatas dua elemen saja dan tidak sampai mengarah pada *innovation space*, namun baru sebatas *consensus space*. Jika melihat pola relasi *triple helix* yang terbangun di atas. Dengan demikian, dalam kegiatan tahap tanggap darurat belum terbangun relasi *triple helix*. Hal ini dibuktikan dengan berbagai informasi yang peneliti peroleh dari informan. Dampak nyata dari ketidak terbangunan relasi *triple helix* ini bisa dilihat dan dirasakan, seperti kurangnya koordinasi bahkan tidak ada koordinasi diantara ketiga elemen tersebut (Muara et al., 2021; Putri et al., 2020; Bastian et al., 2021; Syarifah et al., 2020).

Kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan sepenuhnya posisi yang dipegang oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dapat dilihat dari rendahnya koordinasi yang ada, sehingga tidak terintegrasinya ketiga bagian tersebut. Kalaupun ada hubungan, hanya terbatas pada dua faktor dan mengarah pada ruang konsensus daripada ruang inovasi. Menurut pola hubungan *triple helix* yang disebutkan di atas, hubungan *triple helix* belum

terbentuk pada fase reaksi darurat. Hal ini didukung oleh data yang peneliti kumpulkan dari informan. Konsekuensi sebenarnya dari hubungan *triple helix* yang berkembang dapat dilihat dan dirasakan, seperti kurangnya koordinasi yang lengkap, antara ketiga elemen tersebut.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan Lanni (2019) bahwa program saat bencana dan pasca-bencana yang dapat dilakukan antara lain membentuk tim relawan, tim evakuasi, mendirikan posko peduli bencana, dapur umum dan rumah singgah, penggalangan dana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Perguruan tinggi juga dapat melakukan pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan dan pendampingan khusus bagi mahasiswa yang terdampak, menyelenggarakan program *sit in student* dan transfer kredit bagi mahasiswa daerah bencana sampai mengirim dosen bantu. Perbedaan tersebut di akibatkan oleh adanya tanggung jawab dari elemen *helix* yang saling bekerja sama dalam mitigasi bencana, sehingga pemerintah Kabupaten Buton harus mengambil contoh sehingga dapat diterapkan bila terjadi bencana.

Terjadinya Ego Sektoral Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton

Setiap interaksi antar individu melibatkan penggunaan simbol-simbol yang dibangunnya. Simbol itu memiliki makna bagi dirinya dan kemudian ditransmisikan ke orang lain. Terkait dengan pernyataan tersebut, dalam kondisi di lapangan antar elemen ini membangun makna tentang dirinya melalui simbol-simbol tertentu. Dibalik simbol tersebut tentu ada kepentingan yang ideologis. Hal ini kemudian menjadi penghambat dalam terciptanya relasi *triple helix* saat tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. Ego sektoral yang terjadi lebih bersifat politis. Oleh karena itu, hal tersebut berkaitan dengan masalah kepentingan yang bersifat ideologis. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Nurjanah et al. (dalam Ardiansyah & Pradana, 2021), bahwa hambatan dalam tahap tanggap darurat yang bersifat politis dimungkinkan terjadi karena adanya intervensi politis untuk kepentingan-kepentingan politik atau golongan atau kelompok.

Setiap simbol memiliki makna tersendiri yang kemudian diteruskan kepada orang lain. Terkait dengan pernyataan tersebut, unsur-unsur tersebut menciptakan makna tentang dirinya di lapangan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Tentu saja, ada motivasi ideologis di balik lambang tersebut. Pada tahap reaksi darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Buton, hal ini menjadi penghambat terbentuknya *triple helix*. Egoisme yang muncul lebih bersifat politis. Akibatnya, ada kaitannya dengan isu kepentingan ideologis. Menurut Qoidah & Widowati (2020), intervensi politik untuk kepentingan politik atau partai atau kelompok dapat menimbulkan hambatan dalam tahap tanggap darurat mitigasi

bencana. Adapun faktor penghambat mengenai ego sektoral ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Etzkowitz (2008) yaitu antar elemen ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen *helix*, sehingga relasi *triple helix* tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan (Utama et al., 2020; Adri et al., 2020; Kodar et al., 2020; Rahmat et al., 2020; Yuliarta & Rahmat, 2020; Rahmat et al., 2020; Widyaningrum et al., 2020; Ardinata et al., 2022).

Prosedur Birokrasi yang Ketat Menjadi Penghambat Kolaborasi *Triple Helix*

Prosedur birokrasi berkaitan dengan suatu organisasi dan harus dilakukan secara metodis dengan pengelolaan yang baik dan terukur, sebagaimana tercantum dalam acuan dasar organisasi. Menurut Blau & Meyer (dalam Tictona et al., 2020), seiring berkembangnya birokrasi, birokrasi menjadi lebih sistematis sehingga menghambat proses perubahan. Abdullah (dalam Tictona et al., 2020) menunjukkan bahwa budaya birokrasi lebih jauh dari kesan pelayanan publik yang baik. Jika birokrasi dipandang sebagai sebuah isu, maka proses komunikasi organisasi akan terbatas, dan dampaknya tidak akan mampu membentuk hubungan *triple helix*. Akibat prosedur birokrasi yang terlalu rumit, beberapa perguruan tinggi dan bisnis ragu-ragu untuk bekerja sama dengan pejabat pemerintah. Alhasil, Ardiansyah & Pradana (2021) mencatat bahwa tantangan birokrasi dalam situasi bencana adalah rintangan yang disebabkan oleh budaya di dalam badan, organisasi, atau institusi yang mengunggulkan status, pangkat, jabatan, dan hierarki yang berbelit-belit sehingga jika terjadi bencana, aspek birokrasi dapat menghambat proses mitigasi bencana (Handayani et al., 2022; Tyas et al., 2022; Ruskar et al., 2022).

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya tingkat koordinasi yang terjalin pada elemen *triple helix* sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi terkesan lamban dan disertai kurangnya inovasi dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. Selain itu, antar elemen *triple helix* ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen *helix*, sehingga relasi *triple helix* tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan. Adapun kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- Ardiansyah, F., & Pradana, G. W. (2021). KOLABORASI MODEL PENTAHHELIX DALAM UPAYA PENANGANAN BENCANA WABAH COVID-19 DI KABUPATEN BOJONEGORO. *Publika*, 9(4), 545-560.
- Ardinata, R. P., Rahmat, H. K., Andres, F. S., & Waryono, W. (2022). Kepemimpinan transformasional sebagai solusi pengembangan konsep smart city menuju era society 5.0: sebuah kajian literatur [Transformational leadership as a solution for the development of the smart city concept in the society era: a literature review]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1).
- Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.
- CNN Indonesia. (2021). INFOGRAFIS: Bencana Alam di Indonesia Awal 2021. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128174127-23-599660/infografis-bencana-alam-di-indonesia-awal-2021>, diakses tanggal 28 Januari 2021.
- Etzkowitz, H., Schuler, E., & Gulbrandsen, M. (2000). The evolution of the entrepreneurial university. Jacob, M., Hellström, T.(Eds.), *The Future of Knowledge Production in the Academy*. SRHE and Open University Press, Buckingham, 40-60.
- Fatiatun, F., Firdaus, F., Jumini, S., & Adi, N. P. (2019). Analisis Bencana Tanah Longsor Serta Mitigasinya. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 5(2), 134-139.
- Handayani, S. H., Widana, I. D. K. K., Samudro, E. G., & Mayori, E. (2022). The Influence of Psychological Well Being and Servant Leadership Toward Combat Readiness of The 469th Paskhas Command Battalion Soldiers in Carrying Out the Operation Task. *Technium Social Sciences Journal*, 32, 519-532.
- Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 437-447.
- Lanni, F. (2019). Peran Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* (Vol. 1, No. 1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosda Karya.
- Muara, T., Prasetyo, T. B., & Rahmat, H. K. (2021). Psikologi Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi: Sebuah Studi Analisis Kondisi Psikologis Menghadapi COVID-19 Perspektif Comfort Zone Theory. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 69-77.

- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 257-271.
- Qoidah, N., & Widowati, E. (2020). Manajemen Bencana Gunung Merapi Berbasis Masyarakat. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 1), 203-214.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Ma'rufah, N., Gustaman, F. A. I., Sumantri, S. H., & Adriyanto, A. (2020). Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat COVID-19 kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19-27.
- Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., ... & Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- Rukin, R. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Ruskar, D., Subiakto, Y., Wahyudi, B., & Widana, I. (2022). Organization Capacity of Covid-19 Emergency Hospital Wisma Atlet Kemayoran in handling Covid-19 pandemic. *Technium Soc. Sci. J.*, 28, 561.
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30-38.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- Tictona, R. P., Marantika, S. B., Hendriawan, S. A., Daifullah, B., Krisnawan, G., & Kurniasih, Y. (2020). MANAJEMEN BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(2), 16-25.
- Tyas, T. H., Sutisna, S., Supriyatno, M., & Widana, I. (2022). Lesson Learned from Japan for Flood Disaster Risk Reduction in Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 28, 539.
- Umaroh, R. A., & Ritohardoyo, S. (2016). Strategi penghidupan masyarakat korban bencana tanah longsor (kasus: Kecamatan Banjarmangu dan Kecamatan Karangkojar, Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4).

- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.
- Widha, L., Rahmat, H. K., & Basri, A. S. H. (2021, March). A review of mindfulness therapy to improve psychological well-being during the COVID-19 pandemic. In *Proceeding International Conference on Science and Engineering* (Vol. 4, pp. 383-386).
- Widyaningrum, N., Rahmat, H. K., & Maarif, S. (2020). Langkah Taktis Gaya Kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.

